OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MASA COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU

Habib

Universitas Riau

Pekanbaru, Indonesia

habib.habil16@gmail.com

ABSTRACT

The decline in local tax revenues, especially hotel and restaurant taxes, experienced the deepest decline. The hotel tax that is usually collected is Rp. 4 billion in a month, now only Rp. 200 million. The decline also occurred in restaurant taxes. Restaurant taxes that normally collect Rp 11 billion per month now only collect Rp 2 billion. The data above shows that there have been some declines in several tax items, but the Pekanbaru City tax target has remained stable in the first two semesters of 2020, local taxes collected in the period January to June 8 amounted to Rp. 198 billion. Meanwhile, tax revenue at Bapenda Pekanbaru in the second quarter of 2020 reached IDR 256 billion. Based on data from the Pekanbaru City Regional Revenue Agency (BAPENDA), the total amount of Pekanbaru City taxes with achievements for 2020 is 537.8 billion. Even though it is still in Covid-19 conditions, Pekanbaru City Tax is still better than 2018. This study aims to determine the optimization of local tax revenue during the Covid-19 period for local revenue in Pekanbaru City. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques using observation, interviews and documentation using the snowball method as a source of information. The results of this study indicate that from several sources of PAD, the main concern is tax revenue. In this tax revenue, the realized value achieved increased before the pandemic period, and remained stable during the pandemic. From this basis it can be seen that the regional tax sector has quite an influence on Pekanbaru City's PAD even in the Covid-19 situation..

Keyword: Optimization, Local Taxes, Local Revenue

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara. Maka dari pajak yang dihimpun digunakan dalam membiayai implementasi pembangunan daerah. Dari sejak tahun 1999 pembagian pajak sesuai otoritas pengumpulan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak daerah dikumpulkan oleh daerahnya masing-masing. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah

daerah sesuai dengan undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan publik di daerah dipersilahkan mengurus di rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Kata strategi menurut Bracker dalam Henee, dkk (2010: 53) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani klasik, yakni "strategos" (Jendral), yang pada dasarnya diambil dari pilihan kata-

kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Strategi merupakan salah satu hal penting karena ia memunculkan landasan mencapai suatu tujuan dalam berbagai bentuk. Strategi mempunyai andil besar dalam setiap pengambilan keputusan manajerial. Strategi memunculkan pilihan tentang apa yang tidak perlu dilakukan dan apa yang harus dilakukan.

Strategi menurut Nawawi (2012: 147), dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategi” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Sedangkan menurut Chandler dalam Akdon (2011: 12) mengemukakan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan kata lain, strategi merupakan pilihan dan rute yang tidak hanya sekedar mencapai suatu tujuan akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dalam lingkungan hidup dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

Sejak hadirnya Covid-19 di Indonesia sangat terasa isu yang krusial dapat memunculkan impactnya bagi sector publik (pemerintah) ataupun sector swasta melalui situasi seperti isu yang krusial dapat memunculkan impact negatif. Isu yang krusial dapat memunculkan impact negatif yang langsung terasa merupakan lemahnya ekonomi dan pendapatan serta mengalami fluktuasi angka pengangguran. Isu yang krusial dapat memunculkan impact dari negatif krisis moneter memunculkan isu yang krusial dapat memunculkan impact yang negatif kepada APBN dengan sendirinya juga akan berisu yang krusial dapat memunculkan impact pada APBD. Sektor penerimaan kurang stabil atau faktor ketidakpastian penerimaan dari pemerintah pusat meningkat. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan terhadap PAD yang rendah. Ketika PAD melalui situasi seperti berkurangnya maka kebutuhan dalam segala aspek kepada pemerintah pusat akan semakin tinggi.

Dari beberapa macam sumber PAD yang ada, yang menjadi perhatian merupakan penerimaan pajak. Pada penerimaan pajak ini nilai realisasi yang tercapai mengalami peningkatan sebelum masa pandemi, dan tetap stabil dimasa pandemi. Dari dasar ini dapat

diketahui bahwa dari sektor pajak daerah cukup memberi pengaruh dalam PAD Kota Pekanbaru walaupun dalam suasana Covid-19. Dasar ini menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan sektor pajak daerah dari tahun ketahunnya. Maka dari itu penulis membahasnya dalam Tesis yang diberi judul "Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam masa Covid-19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru".

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis merupakan *BAPENDA* kota pekanbaru. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang penentuan informan lewat pertimbangan bahwa informan yang dipilih merupakan orang-orang yang mengetahui dan ikut serta dalam dan telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga beberapa aktor yang ikut serta dalam pihak pemerintah. Untuk mengakses akses data penulis melakukan observasi deskriptif dan juga wawancara secara mendalam pada informan inti dan informan pendukung maka dari itu akan didapatkan data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENELITIAN

Prakosa (2003:1) pajak secara global ialah "Sumbangan wajib publik untu Negara didasarkan pada Undang-undang dan sebab pembayaran tersebut pemerintah tidak seketika itu membalas jasa yang bisa dilihat".

Pajak daerah ialah kontribusi wajib pajak dilakukan oleh individu atau badan daerah dengan tidak mengakses imbalan seketika itu yang bisa diharuskan dengan landasan peraturan perundang-undangan ada dan bisa dipakai untuk mengongkosi implementasi pemerintah daerah dan pembangunan di daerah. Pajak ialah muasal pembiayaan pokok daerah-daerah. Menurut Marihot P.Siahaan (2005:7) memunculkan pengertian bahwa pajak daerah merupakan: Sumbangsih publik untuk negara sesuai landasan perundang-undangan yang ditetapkan dan wajib pajak mesti membayarnya tanpa mengakses akses balasan jasa secara lansung dipergunakan untuk membiayai negara untuk implementasi pemerintah dan pembangunan daerah.

Lewat peningkatan tata kelola penerimaan pajak seharusnya pemerintah daerah bisa menambah penerimaan pajak daerahnya. Karena selama ini daerah kurang mengenali atau bahkan kurang

mengetahui potensi-potensi yang ada di daerah tersebut.

Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai implementasi pembangunan merupakan cerminan dari penerapan otonomi di daerah. Melihat kesediaan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengkoordinasikan penerimaan daerah yang merujuk dari sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat maupun penerimaan yang merujuk dari daerah itu sendiri. Hal tersebut bisa dilihat dari APBD yang biayanya berasal dari PAD dengan kesesuaian pada pengeluaran pemerintah daerah.

Sejak hadirnya Covid-19 di Indonesia sangat terasa isu yang krusial dapat memunculkan impactnya bagi sector publik (pemerintah) ataupun sector swasta melalui situasi seperti isu yang krusial dapat memunculkan impact negatif. Isu yang krusial dapat memunculkan impact negatif yang langsung terasa merupakan lemahnya ekonomi dan pendapatan serta mengalami fluktuasi angka pengangguran. Isu yang krusial dapat memunculkan impact dari negatif krisis moneter memunculkan isu yang krusial dapat memunculkan impact yang negatif

kepada APBN dengan sendirinya juga akan berisu yang krusial dapat memunculkan impact pada APBD. Sektor penerimaan kurang stabil atau faktor ketidakpastian penerimaan dari pemerintah pusat meningkat. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan terhadap PAD yang rendah. Ketika PAD melalui situasi seperti berkurangnya maka kebutuhan dalam segala aspek kepada pemerintah pusat akan semakin tinggi.

Dilihat dari usaha dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya sangat tergantung pada Indikator-indikator PAD. Indikator yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Ini merupakan beberapa indikator yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Tiga Tahun terakhir pendapatan Kota Pekanbaru disektor Pajak melalui situasi seperti peningkatan yang signifikan dari berbagai sektor Pajak, yang menjadi salah satu sumbangsih besar bagi PAD Kota Pekanbaru, sesuai dengan data berikut:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019

No	Rekening Pajak	2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan asli daerah	788.260.371.972	496.332.147.609	62,97	852.384.410.838	506.031.654.040	59,37	789.882.467.046	627.055.483.994	79,39
2	Pajak daerah	783.260.371.972	491.447.753.902	62,72	847.384.410.838	499.029.402.789	58,89	784.882.467.046	620.937.643.530	79,11
3	Pajak Hotel	90.615.774.452	30.557.085.171	33,72	33.263.811.295	34.984.848.534	105,17	40.000.000.000	40.037.934.104	100,09
4	Pajak Restoran	75.422.752.936	77.064.268.291	102,18	90.440.898.825	92.603.226.069	102,39	117.035.537.059	118.586.072.181	101,32
5	Pajak Hiburan	3.339.290.996	13.365.151.883	100,19	16.507.149.194	16.422.789.255	99,49	21.448.104.752	21.540.605.579	100,43
6	Pajak Reklame	164.917.565.880	19.831.672.483	12,03	222.017.565.881	23.367.011.100	10,52	148.126.884.833	30.954.181.681	20,90
7	Pajak Penerangan Jalan Umum	92.544.465.505	93.896.513.948	101,46	100.100.607.299	101.798.853.218	101,70	107.859.675.186	108.354.097.217	100,46
8	Pajak Mineral Bukan Bantuan Dan Logam	37.036969.763	58.932.191	0,16	12.500.000.000	34.370.498	0,27	20.452.0770430	20.587.605.181	100,66
9	Pajak Parkir	14.489.269.093	16.078.239.731	110,97	18.150.362.117	18.282.968.371	100,73	28.478.103.415	3.388.589.443	11,90
10	Pajak Air Bawah Tanah	41.214.921.831	1.142.876.404	2,77	20.139.000.000	1.615.224.036	8,02	11.016.978.800	135.982.120	1,23
11	Pajak Sarang Burung Walet	17.381.413.388	23.265.153	0,13	12.500.000.000	16.864.500	0,13	5.011.838.533	2.869.285	0,06
12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	132.085.605.322	178.561.361.461	135,19	130.000.000.000	143.695.636.235	110,54	130.061.415.773	132.709.013.913	102,04
13	Pajak Sektor Perkotaan	104.212.342.806	60.868.387.186	58,41	191.765.016.227	66.207.610.973	34,53	155.391.851.265	144.640.692.826	93,08
14	Pendapatan Denda Pajak	5.000.000.000	4.884.393.707	97,69	5.000.000.000	7.002.251.251	140,05	5.000.000.000	6.117.840.467	122,36
15	Lain-Lain Pad Yang Sah	5.000.000.000	4.884.393.707	97,69	5.000.000.000	7.002.251.251	140,05	5.000.000.000	6.117.840.467	122,36

Sumber : BAPENDA Kota Pekanbaru 2020

Dari data diatas menunjukkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017- 2019, kenaikan itu lebih dari separuh item pajak yang ada. Dilihat dari pajak restoran, pajak penerangan jalan umum, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan PBB merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru pada 2019. Bapenda Kota Pekanbaru mencatat pada 2019 Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru 627.055.483.994 miliar. Pada tahun 2020 Pajak hotel, Pajak restoran dan pajak hiburan menjadi indikator utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Berkurangnya aktivitas ekonomi publik akibat adanya Covid-19 memunculkan impact terganggunya

penerimaan publik yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu.

KESIMPULAN

Berkurangnya penerimaan pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran yang melalui situasi seperti berkurangnya terdalam. Pajak hotel yang biasanya terkumpul Rp4 miliar dalam sebulan, sekarang hanya terkumpul Rp200 juta. Berkurangnya itu juga terjadi pada pajak restoran. Pajak restoran yang biasanya terkumpul Rp11 miliar per bulan, sekarang hanya terkumpul Rp 2 miliar. Dari data diatas menggambarkan bahwa terjadi beberapa berkurangnya di beberapa item pajak, walaupun demikian target pajak Kota

Pekanbaru tetap stabil di dua semester pertama 2020, Pajak daerah yang terkumpul pada periode Januari sampai 8 Juni 2020 senilai Rp198 miliar. Dilihat dari, penerimaan pajak di Bapenda Pekanbaru pada kuartal II/2020 mencapai Rp256 miliar. Dan pada semester kedua ini walaupun masih dalam kondisi covid Pajak Kota Pekanbaru tetap lebih baik dari tahun 2018.

Suparmoko. (2006). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco; Bandung.

Supranto. J. (2002). *Statistik, Teori dan Aplikasi*. Edisi Lima. Gramedia; Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, (2011). *Strategic Management For Education Mangement (Manajemen Stegik untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung : Alfabeta
- Henne dkk. (2010). *Manajemen Strategi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Nawawi, Hadari. (2012). *Manajemen Strategik Organisasi Pemerintah Non Profit Bidang Pemerintahan (Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan)*. Yogyakarta : Gadja Mada University Press. Jakarta
- Siahaan, Marihot P. (2005) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Sembilan. CV. Alfabeta; Bandung.
- Sukirno, Sadono. (2001). *Pengantar Makro Ekonomi*. Edisi 2. Raja Grafindo Utara; Jakarta.

- Suparmoko. (2006). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco; Bandung.
- Supranto. J. (2002). *Statistik, Teori dan Aplikasi*. Edisi Lima. Gramedia; Jakarta